

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan sebuah upaya dalam meningkatkan aspek kehidupan masyarakat juga termasuk ke dalam proses pengembangan sistem penyelenggaraan negara dalam mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan bisa dikatakan sebagai kegiatan yang terencana untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat, yaitu dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pembangunan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memajukan kehidupan masyarakat dan sebuah proses dalam perwujudan cita-cita Negara yaitu mewujudkan masyarakat yang makmur, mandiri, adil dan sejahtera secara merata diseluruh wilayah Indonesia. Pembangunan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan suatu daerah dan bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat.¹

Pembangunan juga bisa menciptakan sebuah perubahan yang lebih baik secara terarah dan terencana melalui berbagai macam kebijakan. Pembangunan memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan bagi masyarakat sehingga masyarakat merasa terbantu.

¹ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 219-220.

Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk menciptakan suatu kemajuan baik di bidang sosial maupun ekonomi yang tentunya berkesinambungan tanpa mengabaikan persamaan hak serta menjunjung tinggi pada prinsip-prinsip keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Penyelenggaraan Bhakti TNI merupakan proses pembangunan dengan melibatkan kelompok masyarakat. Masyarakat sebagai aktor atau pelaku utama dalam melaksanakan program ini, maka dari itu masyarakat dianjurkan untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan hadirnya program Bhakti TNI masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi dengan keikutsertaannya dalam proses pembangunan ini. Keterlibatan dari masyarakat disini merupakan salah satu konsep dalam pemberdayaan.

Salah satu hal yang paling penting dalam pembangunan adalah dalam bidang fisik dan sosial yang dapat diwujudkan dengan memperbaiki fasilitas infrastruktur yang ada. Dewasa ini pembangunan infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dan harus lebih di perhatikan khususnya pada desa-desa yang masih minim akan sarana dan prasarana infrastrukturnya.

Adapun salah satu daerah yang sedang mengalami permasalahan dengan pembangunan ini adalah Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut. Bentuk dari permasalahan ini adalah minimnya keterjangkauan pembangunan infrastruktur yang dirasa masih belum maksimal sehingga berdampak kepada minimnya akses aktivitas masyarakat dalam hal sosial dan perekonomian.

Sebelum diadakan pembangunan di Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut kondisi di desa ini yaitu tidak adanya jembatan penyebrangan sehingga tidak bisa menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya sehingga dapat menghambat kegiatan sosial dan ekonomi, kurangnya partisipasi masyarakat untuk membangun desanya sendiri dan sebelum diadakannya Bhakti TNI ini terlaksana, infrastruktur menjadi kendala masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.

Maka dari itu diadakanlah Bhakti TNI yang diwujudkan melalui perbaikan pembangunan fasilitas infrastruktur. Pembangunan berupa infrastruktur ini akan memperbaiki roda pertumbuhan perekonomian juga sosial seperti adanya pembangunan sarana jalan berupa jembatan penyebrangan yang bertujuan untuk meningkatkan kelancaran produktivitas sektor produksi dan sebagai sarana pendukung dalam mempermudah akses transportasi bagi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya.

Pembangunan infrastruktur seperti halnya pembuatan jembatan perintis ini dapat berfungsi sebagai jalan untuk membuka keterisolasian pada suatu wilayah dari dunia luar. Maka dengan adanya pembangunan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan baik dalam bidang ekonomi, sosial ataupun budaya serta dapat meningkatkan mobilitas penduduk sehingga tidak terisolir dari desa tetangga yang lebih maju.

Dengan hadirnya program Bhakti TNI ini merupakan suatu pendekatan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Proses pembangunan masyarakat seperti Bhakti TNI diharapkan agar bisa terealisasi dalam masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat guna ikut membantu pemerintah dalam proses pembangunan. Proses pembangunan masyarakat berupa Bhakti TNI ini dapat dilihat pada segi keterlibatan atau partisipasi masyarakatnya. Tujuan dari Bhakti TNI ini adalah mampu membangun serta menciptakan solidaritas dan sinergitas antara prajurit TNI dengan aparatur pemerintah beserta komponen masyarakat lainnya agar dapat mempererat kemanunggalan antara TNI dan rakyat.

Sesuai dengan salah satu poin visi Kabupaten Garut yaitu “Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan”.² Maka melalui program Bhakti TNI ini akan menumbuhkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan ini memiliki peranan yang sangat penting.

Partisipasi merupakan keterlibatan individu atau kelompok masyarakat pada suatu kegiatan. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat dalam program Bhakti TNI ini bisa dilihat dari peran masyarakat itu sendiri bisa berupa bentuk partisipasi dalam hal ide dan kontribusi tenaga, dimana terlaksananya Bhakti TNI ini berawal dari adanya permasalahan dan kebutuhan yang ada di lingkungan masyarakat setempat.

² <https://www.garutkab.go.id/page/visi-dan-misi--pemerintah-kabupaten-garut-2019-2024>. Di akses pada Tanggal 21 September 2019 Pukul 15.50 WIB.

Partisipasi masyarakat melalui pembangunan ini dapat dilakukan dengan upaya memupuk prakarsa dan inisiatif masyarakat dalam arti bukan hanya sekedar menerima keputusan program pemerintah, tetapi harus juga mampu menemukan berbagai alternatif kegiatan pembangunan lainnya. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan masyarakat karena pembangunan bertujuan untuk memajukan desa itu sendiri agar bisa memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang ada. Partisipasi ini dapat di asumsikan bahwa masyarakat lah yang paling mengetahui masalah dan cara menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan rasionalitas mereka.³

Melihat fenomena yang ada maka dengan adanya program Bhakti TNI, diharapkan masyarakat mampu bergotong royong baik dalam hal barang, uang atau waktu. Dengan adanya partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat maka hasil dari pembangunan nantinya dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri.

Berangkat dari realita di atas, peneliti ingin meneliti lebih jauh tentang pembangunan yang dilakukan oleh TNI-AD pada program Bhakti TNI dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dengan fokus kajian pada program Bhakti TNI Koramil 1107 Limbangan di Desa Mekarsari, Selaawi, Garut.

³ Aprillia Theresia dkk., *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 196.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kurangnya keterjangkauan akses pembangunan fisik berupa jembatan penghubung di Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut sehingga berdampak kepada minimnya akses aktivitas masyarakat dalam hal sosial maupun ekonomi.
2. Untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
3. Dengan hadirnya pembangunan masyarakat melalui program Bhakti TNI ini diharapkan agar bisa terealisasi dalam masyarakat terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dapat disusun sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan masyarakat melalui program Bhakti TNI Koramil 1107 Limbangan di Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut ?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembangunan masyarakat melalui program Bhakti TNI Koramil 1107 Limbangan di Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut ?

3. Bagaimana hasil dari pembangunan masyarakat melalui program Bhakti TNI Koramil 1107 Limbangan di Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan masyarakat melalui program Bhakti TNI Koramil 1107 Limbangan di Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pembangunan masyarakat melalui program Bhakti TNI Koramil 1107 Limbangan di Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui hasil dari pembangunan masyarakat melalui program Bhakti TNI Koramil 1107 Limbangan di Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut.

1.5. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kegunaan yang dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini, di antaranya:

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan juga bisa memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, terutama yang berkaitan dengan sosiologi pembangunan. Dengan adanya penelitian ini juga di harapkan mampu dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam mensosialisasikan program-program pembangunan masyarakat bagi semua kalangan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini semoga dapat bermanfaat untuk mewujudkan masyarakat yang partisipatif dan mandiri. Dan bagi Koramil 1107 Limbangan diharapkan mampu dijadikan gambaran serta tolak ukur dalam keberhasilan maupun kekurangan sebagai bahan penyempurnaan program Bhakti TNI bagi daerah lain dikemudian hari. Sedangkan untuk peneliti semoga bisa menambah wawasan serta pengetahuan yang telah peneliti peroleh terutama yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat.

1.6. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Soetomo sebagai kerangka teoritiknya. Soetomo mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat pada saat ini sedang gencar dilakukan hal tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat yang kurang beruntung. Pemberdayaan masyarakat juga biasanya dilakukan pada pembangunan masyarakat dengan tujuan menuju perubahan yang lebih baik yang bisa diwujudkan dengan meningkatkan taraf hidup serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.⁴

Pemberdayaan masyarakat pada saat ini merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat. Masyarakat maka akan diberikan peluang serta kewenangan dari pengelolaan pembangunan baik dalam hal pengambilan keputusan, kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, evaluasi, bahkan hasil dari pembangunan tersebut.

Pendekatan pemberdayaan, menurut Soetomo, memiliki tujuh prinsip pendekatan yang bisa diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat.

Pertama, sentralisasi menjadi desentralisasi. Sentralisasi merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemilik kepentingan atau *stakeholder* dalam pengambilan keputusan.⁵ Sedangkan desentralisasi merupakan bentuk kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan

⁴ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat (Mungkinkah Muncul Antitesisnya)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 67

⁵ *Ibid.*, hlm. 72-74.

dan sumber daya baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Hal ini didasarkan kepada keinginan serta kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat agar mampu menciptakan perubahan lingkungannya baik dalam hal sosial maupun perekonomian.

Kedua, *top-down* menjadi *bottom-up*. Pendekatan yang bersifat *top-down* merupakan model perencanaan yang digunakan secara terpusat oleh pemegang kekuasaan. *Bottom-up* merupakan perencanaan yang lebih bersifat partisipatif sehingga dari proses hingga mekanisme dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan kepada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu maka hasil dari pembangunan nantinya akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Ketiga, *uniformity* menjadi variasi lokal. Pendekatan *Uniformity* atau penyeragaman biasanya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang beragam sehingga tidak sesuai dengan kondisi sekitar dan hasilnya tidak akan sesuai. Berbeda dengan pendekatan variasi lokal yang lebih relevan jika dilakukan dalam program pembangunan masyarakat. Karena lebih bertoleransi sehingga mampu menciptakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan serta potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat dan program yang dilakukan akan berfokus kepada permasalahan serta kondisi daerah tersebut.⁶

⁶ *Ibid.*, hlm. 74-77.

Keempat, komando menjadi sistem belajar. Proses belajar merupakan pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menerapkan bahwa masyarakat sebagai aktor atau pelaku utama dalam pembangunan. Berbeda dengan sistem komando dimana masyarakat memiliki kedudukan sebagai obyek. Dalam proses pembangunan masyarakat dianjurkan untuk memiliki kemampuan dan hak untuk menyalurkan gagasan kreatif serta seluruh kapasitas yang ada agar ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Kelima, ketergantungan menjadi keberlanjutan. Biasanya dalam pelaksanaan pembangunan itu masyarakat hanya menunggu program dari atas sehingga mereka tidak mampu untuk mengembangkan inisiatif serta kreativitas yang dimilikinya. Jika masyarakat memiliki hak dalam pengelolaan pembangunan maka akan mendorong tumbuh dan berkembangnya kerja sama antar masyarakat sehingga terbentuklah tindakan bersama satu lain. Dengan demikian yang terjadi bukanlah ketergantungan melainkan keberlanjutan dalam pembangunan.

Keenam, *social exclusion* menjadi *social inclusion*. Dalam pendekatan *social exclusion* masyarakat dijadikan sebagai objek sehingga memarjinalkan masyarakat. Masyarakat tidak memiliki hak dalam mengambil keputusan sehingga tidak mampu mengembangkan kapasitas masyarakat. Sedangkan *social inclusion* merupakan pendekatan dalam pemberdayaan yang memberikan peluang kepada masyarakat agar mampu menentukan kebutuhan yang diinginkannya.⁷ Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi serta mampu dan berani dalam bersuara serta

⁷ *Ibid.*, hlm. 78-82.

memiliki kemampuan juga keberanian dalam perbaikan menuju kehidupan yang lebih baik.

Ketujuh *improvement* menjadi *transformation*. *Improvement* merupakan pendekatan yang berfokus pada inovasi atau ide-ide baru sehingga tidak mampu melakukan perubahan pada tatanan struktur. Sedangkan *transformation* berfokus pada perubahan pada sistem serta struktur sosialnya sehingga mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurut Soetomo, pemberdayaan seperti ini akan menjadi sarana menuju perubahan yang lebih baik juga merupakan upaya yang dilakukan secara terus menerus dengan wujud untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dibawah yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.⁸

Pemberdayaan mengandung arti sebagai perbaikan kesejahteraan atau mutu hidup bagi setiap individu dan masyarakat agar memiliki kekuatan dan kemampuan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kemampuan dalam hal-hal berikut : (a) mampu memenuhi kebutuhan dasar sehingga memiliki kebebasan (*freedom*) baik dalam hal kelaparan, kebodohan, kesakitan bahkan mengemukakan pendapat; (b) dapat menjangkau sumber-sumber produktif sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat;⁹

⁸ *Ibid.*, 83-87.

⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, hlm. 58.

(c) dan mampu berpartisipasi dalam proses atau pelaksanaan pembangunan serta ikut serta dalam mengambil keputusan dalam pembangunan.¹⁰

Dalam konteks studi ini, konsep pemberdayaan Soetomo di atas akan diterapkan sebagai berikut.

Pertama, sentralisasi menjadi desentralisasi yang dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan baik dalam hal pengambilan keputusan maupun perencanaan dan pelaksanaan yang dikhususkan kepada masyarakat Desa Mekarsari dalam pembangunan masyarakat melalui program Bhakti TNI. Dalam pembinaan ini menggunakan strategi yang dirancang sesuai dengan rencana yang diinginkan juga dengan melibatkan kelompok masyarakat untuk ikut serta selama pelaksanaan pembangunan ini. Dengan tujuan untuk mendorong masyarakat agar mampu untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan dan sumber-sumber yang mereka miliki.

Kedua, *top-down* menjadi *bottom-up* dilakukan dengan lebih memprioritaskan daerah tertinggal dan daerah terpencil. Perencanaan yang dilakukan dalam pembangunan masyarakat ini diusulkan oleh masyarakat itu sendiri sehingga akan sesuai dengan apa yang telah diharapkan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

¹⁰ *Ibid.*

Ketiga, *uniformity* menjadi variasi lokal dalam pembangunan masyarakat kebutuhan, kondisi, serta keinginan masyarakat menjadi hal yang penting. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan saran atau masukan sehingga masyarakat bisa bebas dalam memberikan aspirasi. Dengan ini, keadaan masyarakat yang akan diberdayakan akan mempengaruhi terhadap keberhasilan pembangunan.

Keempat, komando menjadi sistem belajar terhadap masyarakat yang dijadikan sebagai aktor dalam pembangunan. Masyarakat dianjurkan untuk ikut terlibat dengan keikutsertaannya dalam proses pembangunan dengan tujuan agar secara positif masyarakat mau mengerti, mau berpartisipasi dengan sendirinya agar dapat terwujudnya masyarakat yang terbuka. Dengan hadirnya keterlibatan masyarakat disini merupakan konsep dalam pemberdayaan.

Kelima, ketergantungan menjadi keberlanjutan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan mengembangkan inisiatif serta kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat sehingga nilai kebersamaan akan terjalin satu sama lain.

Keenam, *social exclusion* menjadi *social inclusion* dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut berperan pada semua proses pelaksanaan pembangunan sehingga kesejahteraan akan tercapai.

Ketujuh, *improvement* menjadi *transformation* dengan adanya pembangunan masyarakat ini maka akan menciptakan perubahan yaitu mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks studi ini, Bhakti TNI berfungsi sebagai wadah bagi pemberdayaan masyarakat. Kelompok pemberdayaan ini berupa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pembangunan fisik atau non fisik dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat serta dapat memberikan dorongan semangat pengabdian serta meningkatkan kemanunggalan antara TNI dan masyarakat.

Masyarakat dalam hal ini sebagai aktor atau pelaku utama dalam melaksanakan program ini, sehingga masyarakat dianjurkan untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan masyarakat sebagai penambah kemampuan dalam pengembangan intelektual yang kreatif dan inovatif serta mampu membentuk karakter masyarakat yang memiliki kepedulian serta kesadaran sosial yang tinggi sehingga masyarakat peka terhadap lingkungan. Sehingga akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bergotong royong dalam membangun daerah sendiri.

Berdasarkan kerangka berfikir yang peneliti jabarkan di atas, dapat digambarkan sebagai berikut:

